

BAB II

SEJARAH UIGHUR DAN KONFLIK YANG TERJADI DI XINJIANG, TIONGKOK

Pada bab ini akan lebih membahas tentang sejarah suku Uighur, Konflik yang terjadi antara suku Uighur dengan Tiongkok, Dinamika Konflik antara suku Uighur dengan Tiongkok dan Penyebab Konflik suku Uighur dengan Tiongkok. Diharapkan dengan penjelasan ini membuat pembaca lebih memahami konflik yang sedang terjadi antara suku Uighur dengan Tiongkok. Untuk itu, Bab II akan dibagi lagi menjadi beberapa subbab yang akan membahas mengenai sejarah suku Uighur, Konflik yang terjadi antara suku Uighur dengan Tiongkok, Dinamika Konflik antara suku Uighur dengan Tiongkok dan Penyebab Konflik suku Uighur dengan Tiongkok.

2.1 Suku Uighur di Tiongkok

Pada tahap evolusi sejarah, suku Uighur mendirikan beberapa kerajaan di antara lain: Kerajaan Kekhanan Uighur didirikan di Khanghaj pada tahun 323 yang berdiri selama 200 tahun; Kerajaan Kekhanan Uighur didirikan pada tahun 523 yang berdiri selama 80 tahun; dan Kerajaan Kekhanan Uighur tahun 744 (Issiyev, n.d). Pada tahun 744 sampai 840, berdiri sebuah Kerajaan Kekhanan Uighur dengan ibu kotanya adalah Karabalghasun terletak di Sungai Orkhon. Sebelum kerajaan ini berdiri yaitu tepatnya tahun 742, Raja Ku-li p'ei-lo membuat sebuah kelompok perjuangan yang terdiri dari Uighur, Basmil dan Karluk. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan untuk mengambil alih kekuasaan dari Gokturk. Ketika Raja Ku-li p'ei-lo meninggal pada tahun 747, tahta kepemimpinan diteruskan oleh putranya yang bernama Mo Yen Cho. Masa pemerintahan Mo Yen Cho sangat berbeda dengan ayahnya, sebab dalam setiap pengambilan keputusan dia cenderung lebih ambisius dan tidak teorganisir (Mackerras, 2008).

Kerajaan Kekhanan Uighur melakukan pemberontakan terhadap Dinasti T'ang. Pemberontakan itu bernama pemberontakan An Lu Shan yang terjadi dari tahun 755-763 (Mackerras, 2008). Pemberontakan ini pada awalnya bertujuan untuk menggulingkan Dinasti T'ang namun tidak berhasil. Ketika pemberontakan terjadi, orang-orang Uighur lebih memilih untuk menyelamatkan dan membantu Dinasti Tang. Imbalan atas bantuan tersebut, Dinasti T'ang memberikan sutra dan barang-barang lainnya. Puncak kekuasaan dari Kerajaan Kekhanan Uighur ketika berada dibawah pemerintahan Mou-Yu Khaghan pada tahun 759 (Waugh, n.d.). Ketika pemerintahan Mou Yu, suasana istana sangat dipengaruhi oleh budaya dari Dinasti Tang. Keadaan ini terjadi karena pernikahan dengan putri dari Dinasti T'ang. Mou Yu menetapkan Manichaeisme sebagai agama utama bagi seluruh masyarakat Uighur.

Manichaeisme mengajarkan bahwa awal keberadaan bumi terbentuk menjadi dua belahan yaitu semesta terang dan semesta gelap. Pada awalnya kedua semesta ini hidup damai berdampingan sampai penguasa gelap menginginkan kegelapan yang seutuhnya tanpa adanya cahaya terang. Agama Manichaeisme mengajarkan ritual dan pantangan untuk menjaga tubuh. Semua pantangan yang diajarkan berguna untuk melindungi tubuh manusia dari pencemaran zat gelap. Manichaeisme melarang semua pengikutnya untuk memakan makanan yang berasal dari hewan atau mengambil buah dari pohonnya dan melarang untuk berhubungan intim (Iryana, 2014). Penganut dari agama Manichaeisma akan dibagi menjadi dua kelas pengikut yaitu kelas pilihan dan kelas pendengar (Waugh, n.d.). Agama Manichaeisme berasal dari Persia pada abad ke 3. Pembawa agama ini adalah para pedagang Sogdiana dari Asia Tengah (Mackerras, 2008).

Setelah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan, Kerajaan Kekhanan Uighur mengalami peningkatan setelah berada dibawah kepemimpinan raja Yaghlakar. Namun kerajaan ini kembali mengalami penurunan semenjak tahun 808. Bukti penurunan kerajaan ini dapat dilihat dalam 2 faktor yaitu pertama, faktor dari dalam adalah terjadinya disintegrasi di dalam kerajaan, pemberontakan terhadap tahta kerajaan pada tahun 839 dan juga didorong oleh musim dingin yang parah

sehingga menewaskan banyak hewan ternak. Kedua, faktor dari luar adalah berkembangnya Kerajaan Kirghiz. Pada tahun 840, Kerajaan Kirghiz melakukan serangan ke Kerajaan Kekhanan Uighur yang dibantu oleh pemberontak Uighur dan Kerajaan Kirghiz berhasil mengambil alih kerajaan (Mackerras, 2008). Semenjak Kerajaan Uighur runtuh, masyarakatnya memutuskan untuk pindah ke barat dengan tujuan membuat kerajaan baru. Dalam proses nomada, mereka menunggangi kuda dan unta.

Wilayah ini berpusat di oasis utara Gurun Taklamakan yang membentang sampai ke pegunungan Tien Shan di timur. Sebelum ditempati oleh Uighur wilayah ini ditempati oleh orang-orang Indo-Eropa. Masyarakat suku Uighur yang berhasil selamat dari kehancuran kerajaan membentuk sebuah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Kocho (Gaochang) pada tahun 856-1335 (Waugh, n.d.). Bahasa yang digunakan oleh mereka adalah Turkic Uighur. Pada masa Kerajaan Kocho, masyarakatnya menganut agama Buddhisme. Biara-biara Budha terletak didalam dan di sekitar oasis Turfan. Lukisan yang dipajang di biara memberi bukti tentang transmisi dan transformasi seni Buddha. Buddhisme termasuk 3 agama yang banyak dianut oleh para suku Uighur disamping Manichaeisme dan Kristen Nestorian. (Mackerras, 2008). Kerajaan Kocho berhasil digulingkan oleh orang-orang Mongol pada tahun 1335.

Meskipun sering berpindah tempat mereka banyak memberikan perkembangan dibidang pertanian, kerajinan, perdagangan dan perkembangbiakan ternak. Dalam proses perpindahan mereka menggunakan beberapa hewan ternak sebagai binatang beban diantara lain domba, kuda, sapi dan unta. Ternak yang paling sering dikembangkan oleh masyarakat Uighur adalah domba. Hal itu disebabkan karena domba dapat memberikan mereka berbagai macam jenis produksi seperti wol, kulit domba yang bisa digunakan sebagai bahan pakaian, kotoran domba mampu digunakan sebagai bahan untuk pembakaran seperti arang, daging domba dapat dimakan dan domba menghasilkan susu (Mckerras, 2008). Dari susu tersebut dapat diubah menjadi keju. Wilayah oasis utara Gurun Taklamakan adalah wilayah yang

gersang. Karena wilayah yang gersang inilah membuat masyarakat Uighur mencoba untuk mempraktikkan sistem irigasi yang berfungsi menyambungkan saluran perairan untuk pertanian, menggunakan batu giling dan alu.(Britannica.com, 2019). Hasil pertaniannya yaitu tanaman pangan dan tanaman industri.Tanaman pangan terdiri dari gandum, jagung, kaoliang dan melon dan tanaman industrinya yaitu kapas.

Republik Turkistan Timur merupakan tanah air bagi Suku Uighur dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Turki (Britannica.com, 2019). Populasi Uighur mencapai 15 juta orang. Republik Turkistan Timur terletak di daerah perbatasan Tiongkok. Secara Historis mereka adalah orang Turki di Asia Tengah (The Uyghur American Association, 2012). Pada saat dikuasai oleh Dinasti Qing, Kerajaan Islam Uighur Turkistan Timur mendapat tempat terhormat bahkan mampu memberikan kontribusi besar bagi Tiongkok serta mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Dinasti Qing (The Uyghur American Association, 2012). Kekuasaan Dinasti Qing di Xinjiang terpaksa harus dilepaskan karena Nasionalis Tiongkok berhasil menggulingkan Dinasti Qing pada tahun 1911.

Semenjak peristiwa itu, Xinjiang berada di bawah pemerintahan Nasionalis Tiongkok. Meskipun sudah dibawah pemerintahan Tiongkok suku Uighur tetap berusaha untuk memisahkan diri. Bentuk usaha yang dilakukan oleh Suku Uighur untuk memisah diri yaitu melakukan pemberontakan. Pemberontakan yang dilakukan bertujuan untuk mendeklarasikan Republik Turkistan Timur. Upaya untuk mendeklarasikan Republik Turkistan Timur berhasil dilakukan sebanyak dua kali yaitu tahun 1933 dan 1944 (Radio Free Asia, 2009). Namun wilayah ini mampu diambil kembali oleh Tiongkok pada tahun 1949. Sejak tahun 1949, Xinjiang secara resmi ditunjuk sebagai wilayah otonomi Tiongkok (BBC.com, 2014). Xinjiang adalah wilayah administrasi tingkat provinsi yang wilayahnya terdiri dari seperenam total luas Tiongkok. Xinjiang terletak di sebelah barat Tiongkok dan merupakan wilayah dengan regional terbesar.

Xinjiang sebagai daerah otonom, memiliki tingkat pemerintahan sendiri karena posisinya yang jauh dari pusat pemerintahan Tiongkok. Ada beberapa suku yang menempati wilayah Xinjiang yaitu Uighur, Khazak, Hui, Tajik, Uzbek, dan Tartar yang memeluk agama Islam sedangkan etnis Han, Khalkhas, Mongol, Xibe, Manchu, Rusia, dan Daur memeluk keyakinan lain atau bahkan tidak sama sekali (Jejak Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China, 2018). Populasi dari suku Uighur tidak hanya di Xinjiang saja tetapi juga tersebar di Kazakhstan, Kyrgystan dan Uzbekistan. Wilayah Xinjiang berbatasan dengan delapan negara di antara lain India, Afghanistan, Mongolia, Russia, Kazakhstan, Krygyzstan, Tajikistan, dan Pakistan. Letak Xinjiang yang berbatasan dengan banyak negara membuat wilayah ini sangat strategis sebagai tempat perdagangan. Jalur perdagangan ini bernama “Jalur Sutra”. Akibat dari posisi Xinjiang yang strategis membuat banyak terjadi pertukaran budaya. Oleh sebab itu Provinsi Xinjiang cenderung memiliki budaya yang kosmpolitan dan kehidupan yang makmur. Mereka juga merasa bahwa budaya dan suku lebih mengarah ke negara di Asia Tengah daripada etnis Han yang budayanya lebih condong ke Tiongkok. Inilah salah satu penyebab yang membuat mereka merasa dirinya bukan keturunan orang Tiongkok. Meskipun mereka semakin terintegrasi dengan Tiongkok, mereka tidak pernah bersedia untuk menerima segala gagasan yang sama dengan Tiongkok.

Suku Uighur banyak memberikan kontribusi kepada warisan budaya Tiongkok melalui karangan buku, musik dan seni akrobat. Kaum muslim Uighur juga pandai menyanyi, menari, menulis buku. Hasil karya mereka masih tetap populer hingga saat ini. Selain memberikan kontribusi dalam bidang menyanyi, menari dan menulis buku, Suku Uighur juga memberikan kontribusi dalam dunia hiburan dimana mereka memiliki seorang aktris yang terkenal di Tiongkok. Bentuk kontribusi budaya lainnya yang diberikan kepada Tiongkok yaitu karya buku mengenai Islam yang terkenal ditulis oleh Yusuf Has Hajib tahun 1069-1070 berjudul “*Kutatku Bilig*” (Pengetahuan untuk Kebahagiaan) dan karya dari Mahmud Kashgari Turk “*Divan-i Lugat-it Turk*” merupakan sebuah kitab (kamus bahasa Turki) yang paling

berpengaruh (The Uyghur American Association, 2012). Hingga saat ini, banyak cendekiawan Uighur muncul dan menerbitkan ribuan buku. Uighur memainkan peran penting dalam pertukaran budaya antara Timur dan Barat.

Dalam sejarah bahasa Suku Uighur terdiri dari tiga tahapan diantara lain: pertama, Tahap Kuno. Tahap Kuno terdiri dari 2 periode yaitu abad ke-5 M dan abad ke 6-11 M. Kedua, Tahap Abad Pertengahan. Tahap Abad Pertengahan pecah selama 2 periode yaitu abad ke 11-14 M dan abad 14-18 M. Dan yang terakhir Zaman modern. Zaman modern dibagi menjadi abad ke 18-19 M dan abad ke-20 M (Issiyev, n.d). Bahasa yang digunakan oleh Suku Uighur adalah bagian dari kelompok bahasa Turki Alta. Suku Uighur merupakan orang-orang yang menggunakan bahasa Turki tertua di Asia Tengah. Orang-orang Uighur mayoritasnya memeluk agama muslim. Umat muslim Uighur berjumlah kurang dari setengah sekitar 26 juta penduduk dikawasan itu (Hughes, 2018). Sebelum memeluk agama islam, masyarakat Uighur mempraktikkan Shamanisme, Budha, Manichaeisme, Nestorianisme.

Penyebaran agama Islam di masyarakat Uighur terjadi secara bertahap. Pada tahun 821, Duta besar Arab yang datang ke Ibu kota Uighur di Karabalghasun (Mackerras, 2008). Seluruh masyarakat Uighur mulai memeluk agama Islam pada tahun 934 M dibawah pemerintahan Kerajaan Karahanid. Kota Kashgar yang di tunjuk sebagai ibu kota kerajaan, menjadi salah satu pusat pembelajaran utama dari agama Islam. Seni, sains, musik dan sastra mulai berkembang pesat ketika lembaga-lembaga agama Islam memperkenalkan dan mengajarkan budaya Islam. Kemudian kembali disebarkan ketika Uighur, dibawah pemerintahan Sultan Sutuq Bughra Khan pada tahun 960 SM (Refworld.org, 2017). Hampir seluruh masyarakat Uighur adalah Islam Sunni. Kemudian agama Islam menjadi agama dominan dari suku Uighur hingga saat ini.

Dalam bidang perekonomian, Xinjiang berpusat pada pertanian dan perdagangan, dan pertambangan. Xinjiang termasuk salah satu kota yang berkembang di Tiongkok. Faktor yang mendorong Xinjiang sebagai kota yang berkembang karena

letaknya di Jalur Sutra. Sejak jaman dulu wilayah ini sudah memiliki kepentingan dalam rute perdagangan diantara negara dari Timur dan negara dari Barat yaitu menghubungkan peradaban Yunani dengan budaya Budha dari India dan tradisi Asia Tengah (Mackerras, 2008). Tiongkok ingin mempromosikan Xinjiang sebagai wilayah utama dalam “*China Belt and Road Initiative*”. Projek ini untuk pengembangan infrastruktur dan energy (Congressional Research Service, 2019). Wilayah Xinjiang yang kaya akan mineral membuat Tiongkok memiliki cadangan minyak, dan cadangan batu bara yang terbesar serta gas alam (BBC.com, 2014)

Setelah pembentukan daerah otonom pada 1950an, Tiongkok memutuskan untuk melakukan migrasi besar-besaran Suku Han ke Xinjiang. Populasi Han makin berkembang setelah tahun 1990, dan pada awal abad ke 20, total populasi suku Han menjadi dua perlima dari total populasi masyarakat Xinjiang (Britannica.com, 2019). Jumlah populasi suku han di Xinjiang yaitu 10,5 juta. Suku Han melakukan imigrasi paling banyak ke ibukota provinsi yaitu Urumqi. Akibat dari kebijakan Tiongkok ini membuat Uighur merasa mata pencaharian mereka terancam dan harus bersaing lebih ketat dengan masyarakat dari suku Han. Orang Uighur merasa semenjak kedatangan suku Han di Xinjiang, mereka sangat diuntungkan secara proporsional dari pembangunan ekonomi di Xinjiang. Selain itu, masuknya Suku Han ke Xinjiang juga menyebabkan Suku Uighur merasa tersisihkan. Akibat dari kondisi yang terjadi di Xinjiang membuat kesenjangan ekonomi dan ketegangan etnis mulai tumbuh diantara suku Uighur dan suku Han yang pada akhirnya menimbulkan sebuah protes dan berbagai macam gangguan di Xinjiang.

2.2 Konflik Suku Uighur dengan Tiongkok

Xinjiang merupakan sebuah provinsi yang berbatasan dengan delapan negara. Hubungan yang tidak menentu diantara Tiongkok dan suku Uighur sudah terjadi sejak dahulu kala misalnya pada tahun 1933 dan 1944 dimana Uighur memproklamasikan Republik Turkistan Timur. Hubungan diantara mereka kembali memanas ketika di tahun 1950an, Tiongkok memutuskan untuk memindahkan suku

Han ke Xinjiang. Konflik yang terjadi diantara suku Uighur dan Tiongkok pada dasarnya bentuk perjuangan suku Uighur untuk mendominasi provinsi Xinjiang dan memerdekakan diri dari Tiongkok disamping itu juga karena dipengaruhi gerakan terorisme, ekstrimisme, dan separatisme dan juga usaha Tiongkok dalam mempertahankan keutuhan dan keamanan wilayah mereka. Permasalahan di wilayah Xinjiang masih terjadi hingga saat ini.

Pada 5 April 1990 terjadi pemberontakan senjata di Barin. Kejadian ini menjadi pertanda peningkatan kekerasan Muslim Uyghur di Xinjiang. Perselisihan etnis dan agama menjadi salah satu penyebab dari kerusuhan yang terjadi. Kerasnya sikap yang ditunjukkan oleh Suku Uighur menandai kerasnya perjuangan mereka untuk melepaskan diri dari Tiongkok (Wardhani, 2011). Pemberontakan yang terjadi di Xinjiang juga di pengaruhi oleh faktor teroris. Teroris ini membentuk sebuah kelompok bernama "Partai Islam Turkistan" untuk menciptakan rasa takut dan tekanan. Dalam melakukan aksinya, teroris-teroris ini mengkobarkan "perang suci" dan "Pendirian Turkistan Timur". Para teroris berusaha untuk menekan para pemerintah Tiongkok dengan cara menyandera, menghancurkan mobil dan membunuh polisi, dan juga mengepung seorang fungsionaris pemerintah menggunakan pistol. Tindakan yang dilakukan oleh teroris ini tidak berhenti disitu saja, mereka juga melakukan sebuah ledakan di teater tepatnya pada 28 Februari 1991 yang menyebabkan kematian satu orang dan melukai 13 orang. Di hari yang sama, teroris juga menanam sebuah bom di salah satu toko namun usaha ini tidak berhasil. Pada tahun 1992, terjadi pengeboman bus di ibukota Urumqi yang mengakibatkan 3 orang tewas. Dalam kejadian pengeboman ini pemerintah Tiongkok menganggap bahwa ada kaitannya dengan Partai Turkistan Islam (Castets, *The Uyghurs in Xinjiang-The Malaise Grows*, 2003)..

Kegiatan teroris Partai Turkistan Islam tidak ada habisnya, kelompok ini selalu berusaha untuk membuat tindakan yang meresahkan. Buktinya dapat dilihat dari serangan teroris ini akan terus terjadi sampai apa yang mereka inginkan dapat tercapai. Pada 24 Agustus 1993, teroris ini menikam Abliz Damolla. Beliau adalah

anggota komite eksekutif CPPCC Yecheng di Prefektur Kashgar dan seorang imam Masjid Agung di daerah Kashgar(Chinaorg.cn, 2009).Kelompok teroris ini juga merupakan dalang dari ledakan yang terjadi di departemen store, pasar, hotel dan tempat kebudayaan.Semua kejadian ini menimbulkan korban jiwa dan korban luka-luka. Setelah dua tahun dari kejadian tersebut yaitu pada tanggal 7 Juli 1995, kelompok teroris ini melakukan pembobolan terhadap kantor Komite Partai Prefektur, kantor pemerintah dan kantor keamanan publik di Hotan.

Pada 22 Maret 1996, terjadi penyerangan ke rumah Hakim sidiq Haji. Beliau merupakan Wakil Ketua Asosiasi Islam Daerah Xinhe, Prefektur Aksu dan asisten Imam masjid. Penyerangan ini dilakukan oleh dua orang teroris dengan senjata lengkap dan memakai topeng.Teroris ini menembak Sidiq Haji hingga meninggal.Selang 1 bulan dari kejadian penyerangan tersebut tanggal 29 April 1996, 12 teroris bersenjata lengkap berusaha menerobos masuk ke rumah Qavul Toqa.Beliau merupakan anggota Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC) dan Wakil Kongres Rakyat Daerah Otonomi Xinjiang Uighur di Desa Qunas, Kotapraja Alaqagha, Kabupaten Kuqa(Castets, The Uyghurs in Xinjiang-The Malaise Grows, 2003).

Teroris-teroris tersebut melemparkan dua bom ke dalam rumah sehingga melukai dia dan istrinya, selain itu adik dari Qavul Toqa juga ikut diserang.Teroris ini menikam hingga meninggal dengan tujuh luka tusukan ditubuhnya.Setelah selesai membunuh adik dari Qavul Toqa, para teroris menusuk istri dari Qavul Toqa dan menembaknya hingga meninggal.Tidak berhenti sampai situ saja, kekejaman masih terus berlanjut di keluarga Qavul Toqa.Para teroris membunuh keluarga dari putra Qavul Toqa yaitu Anvar Qavul.Pada tanggal 12 Mei 1996, para teroris kembali melakukan aksinya dengan membunuh Arunhan Aji, Kepala Masjid Id Kah dan membunuh Wakil Ketua Komite Regional Xinjiang. Berselang 3 bulan kemudian, tanggal 27 Agustus 1996, enam teroris yang menggunakan seragam perang masuk kedalam Kantor Pemerintah Rakyat Kotapraja Jangilas, Kabupaten Yecheng. Para teroris meliakukan pemotongan saluran telepon dan membunuh Wakil Kepala

Kotapraja serta polisi yang sedang bertugas pada hari itu. Selain melakukan pemotongan saluran telepon, mereka menculik 3 petugas keamanan dan 1 kapal air, kemudian membunuh para petugas keamanan dan membuang mayatnya di padang pasir(Chinaorg.cn, 2009).

Selama Bulan Ramadhan, Pemerintah Tiongkok mengumpulkan polisi untuk melakukan eksekusi terhadap 30 tersangka yang tergabung di dalam kelompok separatisme. Namun tindakan yang diambil oleh Tiongkok membuat masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran pada Februari 1997. Demonstrasi ini mulai memuncak ketika insiden Ghulja pada 5 Februari 1997. Insiden Ghulja adalah sebuah kejadian yang menyerang Tentara Pembebasan Rakyat. Akibat dari kejadian itu menyebabkan 9 orang meninggal(Human Right Watch, 2001). Orang-orang Suku Uighur turun ke jalanan di Yining pada 1997. Dengan turunnya orang-orang Uighur ke jalan menimbulkan kerusakan properti. Anggota dari gerakan nasionalis bergerak di bawah tanah, dengan membentuk kelompok-kelompok untuk mengadvokasi aksi kekerasan, termasuk terorisme. Kelompok separatis di distrik Xidan, Beijing melakukan aksinya dengan megebom sebuah bus dan menewaskan dua orang. Kejadian ini terjadi pada 7 Maret 1997. Kelompok separatis dan Organisasi Turki untuk Kebebasan Turkistan Timur bertanggung jawab atas serangan yang terjadi. (Millward, 2007). Para partisipasi Uighur yang terlibat dalam aksi itu dipecat oleh Pemerintah Tiongkok. Akibat dari tindakan pengeboman ini, Pemerintah Tiongkok akan mengambil tindakan atas segala gerakan separatisme yang terjadi di Xinjiang.

Kegiatan yang dilakukan oleh para teroris ini tidak hanya meledakan atau melakukan kerusuhan tetapi mereka juga meracun masyarakat di Kota Kashgar. Akibat dari tindakan itu menyebabkan orang yang tidak bersalah meninggal dan empat lainnya menderita luka serius. Selain meracuni masyarakat, mereka juga meracuni para ternak. Para teroris juga berani meledakkan Kantor Konsulat Jendral Tiongkok di Istanbul. Semua kejadian ini terjadi di tahun 1998. Antara tahun 1990 sampai 2001, pemerintah Tiongkok memperkirakan sudah terjadi 200 serangan

teroris yang menyebabkan 162 kematian (Castets, 2019).Pemerintah Tiongkok secara bertahap mulai menangkap kelompok teroris ini.

Pada awalnya dikenal dengan nama Partai Turkistan Islam atau Gerakan Islam Turkistan, namun nama tersebut diubah menjadi Gerakan Islam Turkistan Timur (*East Turkistan Islamic Movement*) (SITE INTELLIGENCE GROUP, 2014). Gerakan ini adalah organisasi separatis dan teroris Islam yang dibentuk oleh para militan Uighur di daerah barat Tiongkok.Gerakan ini dibentuk pada tahun 1997 dan masih ada hingga sekarang.Tujuan didirikannya kelompok ini adalah untuk kemerdekaan Turkistan Timur dari Tiongkok.Gerakan ini ingin mendapatkan perhatian dari jaringan teroris di Al-Qaeda.Para teroris ini mempromosikan kelompoknya dan menyebarkan sebuah pesan melalui jaringan sosial.Agar penyebaran video tersebut tidak semakin luas Pemerintah Tiongkok memutsukan untuk mengendalikan jaringan internet.

Segala kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di Xinjiang juga disebabkan oleh kedatangan Suku Han.Semenjak kedatangan mereka di Xinjiang, Suku Han lebih mendapatkan kesempatan untuk pekerjaan.Karena mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik mayoritas dari Suku Han memiliki perkonomian yang baik dibandingkan masyarakat dari Suku Uighur.Hal ini menjadi pemicu muncul rasa ketidakadilan bagi Suku Uighur.Akibat dari Kesenjangan ekonomi menimbulkan ketegangan etnis diantara Suku Uighur dan Suku Han.Dari ketegangan etnis yang terjadi menimbulkan sebuah protes dan berbagai kejadian lainnya.Salah satu bentuknya adalah terjadi protes keras yang dilakukan oleh Suku Uighur menjelang Olimpiade Beijing pada 2008. Pada 7 Maret 2008, seorang wanita dari suku Uighur, melakukan serangan di salah satu maskapai penerbangan yang hendak terbang dari Kota Urumqi menuju Beijing.

Selang 2 bulan kemudian, 4 Agustus 2008, teroris yang dilengkapi senjata mengendarai truk dan sengaja menabrak lebih dari 70 polisi.Akibat dari kejadian ini menyebabkan 17 belas orang meninggal dunia dan 15 orang lainnya luka-

luka.(Chinaorg.cn, 2009). Kerusuhan etnis antara Uighur dan Han terjadi dalam skala besar pada tahun 2009 di Urumqi, ketika kerusuhan ini terjadi sekitar 200 orang tewas kebanyakan dari mereka adalah orang suku Han dan sebanyak 1700 terluka (BBC.com, 2014). Insiden kekerasan meningkat dengan melakukan serangan yang menggunakan pisau dan melakukan bom bunuh diri (Britannica.com, 2019).Pemerintah Tiongkok mengambil tindakan memutuskan jaringan internet.Meskipun begitu kejadian ini masih tetap terjadi.

Gerakan Islam Turkistan Timur (ETIM) kembali melakukan beberapa serangan, seperti di Kashgar pada tahun 2011 terjadi insiden penusukan kepada polisi dan warga biasa.Penyerangan terhadap polisi dan warga dilakukan oleh seorang pemuda yang telah tercuci otaknya akibat menonton video yang disebar oleh Partai Islam Turkistan. Kekerasan ini tidak hanya terjadi di wilayah Xinjiang tetapi juga terjadi di luar wilayah Xinjiang diantara lain di Kunming, Provinsi Yunan menewaskan 29 orang. Kejadian ini terjadi pada bulan Maret 2013. Kembali terjadi serangan di Lapangan Tiananmen pada Oktober 2013 yang menyebabkan 5 orang tewas yaitu 2 orang turis. Dalam upaya Tiongkok untuk meredakan serangan terorisme yang terjadi, Tiongkok melakukan eksekusi kepada 13 orang yang melakukan serangan teroris di wilayah barat Provinsi Xinjiang, 13 orang tersebut adalah pelaku yang menyebabkan kejadian tabrakan mobil di lapangan Tiananmen di Beijing pada tahun 2013 (China Eksekusi 13 Orang terkait Serangan Tiananmen, 2014). Dari kejadian itu menyebabkan lima orang tewas dan 40 orang lainnya mengalami cedera.

Setelah Tiongkok memutuskan untuk melakukan eksekusi kepada para pelaku, gerakan dari kelompok teroris ini kembali melakukan serangan menggunakan pisau di Kunming pada Maret 2014 yang menyebabkan 31 orang meninggal dunia dan 143 orang terluka (BBC.com, 2014). Pada bulan Mei 2014, terjadi serangan di salah satu pasar tradisional yang menyebabkan 43 orang meninggal dunia dan 90 orang terluka. Masih di tahun yang sama juga terjadi beberapa serangan kecil oleh teroris dengan korban kurang lebih mencapai 300 korban di Tiongkok. Keterlibatan

Partai Islam Turkistan di Afghanistan bersama dengan Taliban serta Suriah, membuat Tiongkok semakin khawatir akan kelompok setiap pergerakan yang mereka lakukan.

Partai Islam Turkistan ikut terlibat dalam Konflik Suriah membuat keberadaan mereka makin diakui didalam dunia perterorisan. Setelah terlibat dalam Konflik Suriah, Partai Islam Turkistan bergabung dalam kelompok Hayat Tahrir al-Sham di barat laut Suriah. Keuntungan yang mereka dapatkan setelah bergabung dengan kelompok itu, mereka mendapatkan akses alat berat dan kemampuan untuk memobilisasi beberapa ratus orang yang bersedia bergabung dengan kelompok ini (Castets, 2019). Pada 28 September 2015, Partai Islam Turkistan menyerang para pekerja tambang batu bara pada saat jam istirahat. Akibat dari kejadian ini menewaskan 50 orang. Setelah melakukan serangan itu, para teroris melarikan diri sehingga membuat pasukan keamanan Tiongkok melakukan perburuan kepada para pelaku. Para pelaku baru bisa ditangkap oleh pihak kepolisian Tiongkok setelah melakukan pencarian selama 56 hari (Martina & Blanchard, 2015).

Teroris ini juga berani melakukan serangan ke Kantor Kedutaan besar. Kedutaan Besar Tiongkok di Kirgistan mengalami serangan bom bunuh diri. Pelaku dari bom bunuh diri itu adalah oleh seorang warga dari Suku Uighur. Kejadian ini terjadi pada 30 Agustus 2016. Pengeboman ini juga terjadi di Karakax pada 28 Desember 2016. Dalam kejadian ini, polisi berhasil membunuh 4 pelaku yang melakukan pengeboman (Dzyubenko, 2016). Menurut pemerintah pelaku dari pengeboman ini adalah seorang warga dari Suku Uighur yang telah bergabung dengan kelompok teroris Partai Islam Turkistan Timur. Dalam bulan yang sama juga terjadi serangan teroris yaitu dimana empat teroris menabrak sebuah halaman di pemerintah daerah Moyu dan meretas karyawan serta melempar bom rakitan. Dari kejadian tersebut mengakibatkan seorang pejabat dan seorang petugas keamanan tewas dan tiga orang lainnya mengalami cedera (Xin, Xinjiang in Safest Period, wounds healing after three peaceful years, 2019).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari tahun 1990 hingga akhir Desember 2016, telah terjadi ribuan serangan teroris di Xinjiang yang dilakukan oleh pasukan teroris, separatistis dan ekstrimisme yang menewaskan sejumlah besar orang yang tidak bersalah dan ratusan petugas polisi selain itu juga menimbulkan kerugian harta benda yang sangat banyak (Xin, Xinjiang in Safest Period, wounds healing after three peaceful years, 2019)

2.3 Dinamika Konflik suku Uighur dengan Tiongkok

Dinamika konflik yang terjadi diantara Uighur dan Tiongkok belum bisa dikatakan mereda, sebab sejak jaman kerajaan hingga saat ini situasi diantara kedua belah pihak masih belum membaik. Hubungan kerja sama antara Tiongkok dan Uighur sudah dimiliki sejak jaman kerajaan. Masa pemerintahan Mo Yen-Cho adalah masa yang memiliki hubungan paling kuat dengan Dinasti T'ang (Mackerras, The Uighur Empire: According to the T'ang Dynastic Histories, 1972).

2.3.1 Tahap Emergence

Ketika Kerajaan Kekhanan Uighur memutuskan untuk melakukan pemberontakan terhadap Dinasti T'ang, pemberontakan ini bernama pemberontakan An Lu-Shan (755-763). Pemberontakan ini bertujuan untuk menggulingkan Dinasti T'ang. Namun kegiatan ini tidak berhasil menggulingkan Dinasti T'ang. Ketika pemberontakan terjadi, orang-orang Uighur lebih memilih untuk menyelamatkan serta membantu Dinasti Tang. Di tahun 760an, hubungan diantara Khaghan Uighur dengan Dinasti T'ang naik turun sebab banyak terjadi pertempuran dan pemberontakan. Bahkan di tahun 765, kembali terjadi pemberontakan. Namun dalam pemberontakan ini, P'u-ku Huai-en memperbesar pasukan dari pemberontakan sebelumnya yang sempat gagal. Pasukannya tidak hanya mengandung orang dari Khaghan Uighur saja tetapi juga dari Tibet dan suku asing lainnya. Pemberontakan ini bertujuan untuk merebut wilayah utara Sungai Wei yang juga diikuti oleh orang Tibet. Ketika pemberontakan ini sedang berlangsung P'u-ku Huai-en memberitakan

bahwa Kuo Tzu-i telah meninggal. Namun berita yang telah disebarkan tersebut adalah sebuah kebohongan.

Setelah P'u-ku Huai-en meninggal diakhir September 765, orang Khaghan Uighur mulai kehilangan arah. Disamping itu Kuo Tzu-i yang mendengar berita kebohongan tersebut berusaha untuk menunjukkan dirinya dengan cara menemui orang Khaghan Uighur tanpa menggunakan baju besi dan hanya menunggangi kuda tanpa dikawal. Setelah mengetahui hal tersebut, orang Khaghan Uighur menyerahkan diri ke otoritas Kuo Tzu-i dan membantu melawan orang-orang Tibet. Selain itu Khaghan Uighur juga meminta maaf telah menjadi bagian dari pemberontakan tersebut dan bersumpah. Dinasti T'ang memaafkan Khaghan Uighur (Mackerras, *Thei Uighur Empire: According to the T'ang Dynastic Histories*, 1972). Hubungan baik diantara Khaghan Uighur juga dapat terlihat dari pernikahan dengan putri dari Dinasti T'ang dan suasana istana yang mulai dipengaruhi oleh budaya dari Dinasti T'ang. Selain itu Khaghan Uighur mendapatkan bantuan militer yang utama dan efektif.

Walaupun hubungan diantara Dinasti T'ang dan Kerajaan Kaghan Uighur sempat membaik, hubungan ini kembali memanas ketika di tahun 779 atas hasutan dari para Sogdian untuk melakukan serangan terhadap Dinasti T'ang karena di tahun itu Kaisar Tai-tsung meninggal dunia. Para Sogdian berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan serangan. Mou-Yu mengikuti saran tersebut. Dinasti T'ang di tahun 780 melakukan pembalasan dengan mengutus salah satu perwakilan mereka yaitu Chang Kuang-Sheng dengan membantai sekitar 1.000 masyarakat Uighur (Mackerras, 2008). Selain itu menteri dan sepupu pertama Mo-Yu yaitu Tun Mo-Ho ikut serta dalam pembalasan dendam dan membunuh Mo-Yu dan penasihat Sogdiannya (Mackerras, *Thei Uighur Empire: According to the T'ang Dynastic Histories*, 1972). Hal itu dilakukan karena mereka anti-Sogdian. Tun Bagha disarankan juga oleh para mentrinya untuk melakukan pembalasan dengan cara membunuh salah satu orang dari Dinasti T'ang yang datang ke Karabalghasun. Pembalasan dendam ini bertujuan agar Dinasti T'ang meminta maaf. Namun Tun

Bagha menolak untuk melakukan balas dendam tersebut. Meskipun ketika pada masa pemerintahan Mo-Yen Cho dan Mou-Yu Kashgan sempat terjadi pemberontakan dan serangan, hubungan mereka dengan Dinasti T'ang membaik kembali.

Pada masa pemerintahan Tun Mo-Ho tahun 780 menunjukkan sikap yang lebih ramah kepada Dinasti T'ang (Mackerras, *The Uighur Empire: According to the T'ang Dynastic Histories*, 1972). Khaghan Uighur membantu Kaisar Te-tsung di tahun 784 untuk mencegah jatuhnya wilayah Pei-ting ke tangan Tibet. Hal ini masih terus berlanjut hingga tahun 790, dimana Ketua menteri dan Jendral Uighur, Hsieh yii-chia-ssu bertempur dengan pasukan Tibet sampai pada ekspedisi kedua untuk tetap merebut wilayah Pei-ting. Untuk mewujudkan hal tersebut, Hsieh yii-chia-ssu memanggil Yang Hsi-ku untuk membantu mewujudkannya.

Tetapi yang terjadi adalah malah membunuh Hsieh yii-chia-ssu di akhir tahun 791 tanpa mendengar penjelasan dari Hsieh yii-chia-ssu (Mackerras, *The Uighur Empire: According to the T'ang Dynastic Histories*, 1972). Akhirnya orang Khaghan Uighur merasa ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan dan permusuhan dengan Dinasti T'ang mulai terjadi. Kerenggangan hubungan ini dapat dilihat dari Kerajaan Khaghan Uighur tidak lagi diundang oleh Dinasti T'ang untuk ikut serta dalam perang. Sikap dari Dinasti T'ang mulai berubah ketika saat periode Kerajaan Khaghan Uighur berakhir. Hubungan antara Suku Uighur dengan Kekaisaran Tiongkok selama beratus-ratus tahun mengalami hubungan yang naik turun sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan keduanya tidak selalu memiliki hubungan baik.

Namun ketika masa Dinasti Qing, Kerajaan Islam Uighur Turkistan Timur mampu mendapat pengakuan kedaulatan dari Dinasti Qing. Sehingga ketika masa Dinasti Qing, Hubungan antara Tiongkok dengan suku Uighur mengalami perbaikan. Hal itu disebabkan karena pada zaman ini, Republik Turkistan Timur adalah wilayah yang merdeka. Setelah kaum nasionalis Tiongkok berhasil mengalahkan Dinasti Qing di tahun 1911, dengan begitu Turkistan Timur berhasil diambil alih juga oleh pemerintah nasionalis Tiongkok (*The Uyghur American*

Association, 2012). Meskipun Republik Turkistan Timur berhasil diambil oleh pemerintah nasionalis Tiongkok, suku Uighur tetap berusaha agar mampu memerdekakan Republik Turkistan Timur kembali. Perjuangan yang dilakukan oleh suku Uighur ini berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka melakukan berbagai upaya agar mampu mewujudkan keinginan mereka. Hingga akhirnya mereka mampu mewujudkannya upaya untuk mendeklarasikan Republik Turkistan Timur sebanyak dua kali yaitu tahun 1933 dan 1944 (Radio Free Asia, 2009).

Setelah berkonflik dengan Tiongkok, akhirnya Tiongkok berhasil untuk mengambil alih wilayah pada tahun 1949 ketika Partai Komunis Tiongkok. Kemudian wilayah yang diduduki oleh suku Uighur menjadi wilayah otonom mereka semenjak 1955. Selain itu Tiongkok juga mengganti nama provinsinya menjadi “*Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR)*” yang beribukota di Urumqi. Tiongkok berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan cara memberikan hak penentuan nasib sendiri (*right to self-determination*) (Wardhani, 2011). Masuknya suku Han ke Provinsi Xinjiang membuat suku Uighur merasa tersingkirkan dari wilayah mereka sendiri. Semenjak kedatangan Suku Han, mereka lebih mendapatkan kesempatan untuk pekerjaan karena suku Han berhasil bersaing dan memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Pemerintah Tiongkok.

Karena Suku Uighur tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan sehingga membuat mereka memiliki perekonomian yang tidak baik. Dikarenakan susahny mendapatkan pekerjaan, tidak sedikit masyarakat Uighur keluar dari Xinjiang untuk mendapatkan pekerjaan dengan harapan agar perekonomian keluarga mereka dapat meningkat. Namun sayangnya wanita-wanita dari Suku Uighur yang memutuskan untuk keluar dari Provinsi Xinjiang untuk mendapatkan pekerjaan tidak sesuai yang diharapkan karena mereka kebanyakan menjadi pembantu di negara tetangga. Atas kejadian ini menjadi pemicu munculnya rasa ketidakadilan bagi Suku Uighur. Akibat dari Kesenjangan ekonomi yang dialami oleh Suku Uighur menimbulkan ketegangan etnis sehingga menimbulkan protes dan berbagai kejadian lainnya.

2.3.2 Tahap Escalation / Kekerasan

Semenjak tahun 1990an hingga saat ini hubungan diantara keduanya selalu diselingi oleh konflik. Hubungan antara suku Uighur dan Tiongkok masih belum membaik sepenuhnya. Hubungan antara suku Uighur dengan Tiongkok memanas ketika tanggal 5 April 1990 terjadi pemberontakan senjata di Barin. Pemberontakan ini menjadi bukti dari meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Kerasnya sikap yang ditunjukkan oleh Suku Uighur menandai perjuangan mereka untuk melepaskan diri dari Tiongkok (Wardhani, 2011). Pemberontakan yang terjadi di Xinjiang juga di pengaruhi adanya kelompok teroris. Teroris bekerja sama dengan “Partai Islam Turkistan” untuk menciptakan rasa takut dan tekanan. Karena adanya tindakan dari terorisme ini membuat Tiongkok semakin memperketat keamanan di wilayah Xinjiang untuk mempertahankan keamanan di wilayah tersebut. Pergerakan dari kelompok teroris ini terus terjadi hingga tahun 1996. Mereka melakukan berbagai cara mulai dari menyandera, melakukan pengeboman, menghancurkan mobil dan membunuh polisi, dan juga mengepung seorang fungsionaris pemerintah menggunakan pistol.

2.3.3 Tahap War/Perang

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para warganya. Upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan polisi untuk melakukan eksekusi terhadap 30 tersangka yang tergabung di dalam kelompok separatisme. Ternyata tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok ini menimbulkan dampak negatif di lingkungan masyarakat. Untuk menunjukkan rasa ketidaksetujuan atas keputusan yang diambil oleh Tiongkok, masyarakat di wilayah Xinjiang melakukan demonstrasi besar-besaran pada Februari 1997. Selain melakukan demonstrasi, mereka juga menyerang Tentara Pembebasan Rakyat. Akibat dari kejadian itu menyebabkan 9 orang meninggal (Human Right Watch, 2001). Orang-orang Suku Uighur yang turun ke jalanan juga menimbulkan kerusakan properti.

Anggota dari gerakan nasionalis yang bergerak di bawah tanah berusaha untuk melakukan usaha lain yaitu dengan membentuk sebuah kelompok untuk mengadvokasi aksi kekerasan, termasuk terorisme dan separatisme. Setelah kelompok ini dibentuk, mereka mulai melakukan aksinya dengan mengebom sebuah bus dan menewaskan dua orang. Kejadian ini terjadi pada 7 Maret 1997 di Xidan, Beijing. Dalam melakukan aksinya tersebut kelompok separatis ini didukung oleh Kelompok separatis dan Organisasi Turki untuk Kebebasan Turkistan Timur (Millward, 2007). Kegiatan yang dilakukan oleh para teroris ini tidak hanya meledakan atau melakukan kerusuhan tetapi mereka juga meracun masyarakat di Kota Kashgar. Antara tahun 1990 sampai 2001, pemerintah Tiongkok memperkirakan sudah terjadi 200 serangan teroris yang menyebabkan 162 kematian (Castets, 2019). Pemerintah Tiongkok secara bertahap mulai menangkap kelompok teroris ini.

Terjadi protes keras yang dilakukan oleh Suku Uighur menjelang Olimpiade Beijing pada 2008. Pada 7 Maret 2008, seorang wanita dari suku Uighur, melakukan serangan di salah satu maskapai penerbangan yang hendak terbang dari Kota Urumqi menuju Beijing. Selang dua bulan kemudian, 4 Agustus 2008, teroris yang dilengkapi senjata mengendarai truk dan sengaja menabrak lebih dari 70 polisi. Akibat dari kejadian ini menyebabkan 17 belas orang meninggal dunia dan 15 orang lainnya luka-luka. (Chinaorg.cn, 2009). Kerusuhan etnis antara Uighur dan Han terjadi dalam skala besar pada tahun 2009 di Urumqi, ketika kerusuhan ini terjadi sekitar 200 orang tewas kebanyakan dari mereka adalah orang suku Han dan sebanyak 1700 terluka (BBC.com, 2014). Insiden kekerasan meningkat dengan melakukan serangan yang menggunakan pisau dan melakukan bom bunuh diri (Britannica.com, 2019). Pemerintah Tiongkok mengambil tindakan memutuskan jaringan internet. Meskipun begitu kejadian ini masih tetap terjadi.

Kelompok teroris ini tetap melakukan berbagai tindakan seperti yang terjadi di tahun 2011, 2013 dan 2014, dimana mereka melakukan penusukan kepada polisi serta warga biasa, serangan di lapangan Tiananmen pada Oktober 2013, serangan menggunakan pisau di Kunming pada Maret 2014 (BBC.com, 2014). Gerakan dari

Partai Islam Turkistan ini tidak berhenti meskipun Tiongkok sudah melakukan upaya eksekusi mati. Gerakan ini kembali melakukan kegiatannya dengan menyerang para pekerja tambang batu pada 28 September 2015 dan mereka juga berani melakukan serangan ke Kedutaan Besar Tiongkok di Kirgistan yang berupa bom bunuh diri. Pelaku dari bom bunuh diri adalah orang suku Uighur. Kejadian ini terjadi pada 30 Agustus 2016. Selang beberapa bulan yaitu tepatnya pada 28 Desember 2016, empat teroris menabrak sebuah halaman di pemerintah daerah Moyu dan meretas karyawan serta melempar bom rakitan. Dari kejadian tersebut mengakibatkan seorang pejabat dan seorang petugas keamanan tewas dan tiga orang lainnya mengalami cedera (Xin, Xinjiang in Safest Period, wounds healing after three peaceful years, 2019). Hukuman yang diterima terhadap pelaku serangan tersebut adalah hukuman mati.

2.3.4 Tahap De-eskalasi

Sejak serangan terror terakhir yang terjadi wilayah Moyu di Prefektur Hotan pada 28 Desember 2016, situasi di Xinjiang berada dalam situasi yang dapat dikatakan mulai stabil. Situasi tersebut dapat terjadi setelah Tiongkok mulai mengoperasikan Kamp Pendidikan dan Pelatihan. Semenjak pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja aktivitas dari gerakan kelompok nasionalis seperti Terorisme, separatisme, dan ekstrimisme agama mengalami penurunan. Bagi para penjahat yang telah dijatuhkan hukuman atas tindakannya dan memasukkannya di Pusat pendidikan dan pelatihan kerja. Didalam Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja tidak ada penindasan etnis minoritas ataupun pelanggaran keyakinan keagamaan. Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap suku Uighur di Xinjiang adalah untuk memerangi gerakan-gerakan nasionalis yang membahayakan keamanan atau bisa disebut sebagai bentuk Tiongkok yang anti-terorisme atau anti-separatisme.

Peserta pelatihan yang dapat meninggalkan pusat pendidikan dan pelatihan adalah adalah peserta yang telah menyelesaikan kursus tentang Bahasa Tiongkok standar lisan dan tulisan, pengetahuan hukum dan dan peraturan, ketrampilan kerja,

mengamankan stabilitas pekerjaan dengan bantuan pemerintah dan memulai hidup bahagia dengan kualitas yang telah meningkat (Xin & Lingzhi, Global Times, 2020). Setelah peserta usai dilatih di Kamp Pendidikan dan Pelatihan Kerja mereka akan dikeluarkan dari kamp tersebut untuk kembali hidup normal dan kembali berkumpul bersama keluarga. Pusat Pendidikan ini dan Pelatihan Kerja dapat dihapuskan jika suatu waktu masyarakat sudah tidak lagi membutuhkannya. Tiongkok mengungkapkan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang didirikannya itu adalah bagian dari kampanye untuk mengurangi terorisme, ekstrimisme agama dan separatisme.

2.3.5 Resolution

Beberapa bentuk upaya dalam menjaga kestabilan di wilayah Xinjiang diantara lain pertama, provinsi Xinjiang menerapkan pemeriksaan keamanan yang lebih ketat. Meskipun pada awalnya masyarakat merasa tidak nyaman namun secara bertahap mereka menyadari bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan keamanan dan keselamatan publik. Upaya ini membuahkan hasil sebab selama tiga tahun, penduduk merasakan keamanan dalam sejarah kehidupan di Xinjiang dan hasil lainnya adalah ekonomi masyarakat telah membuahkan hasil dari stabilitas keadaan di wilayah Xinjiang mulai terjadi (Xin, Global Times, 2019). Meskipun keadaan dapat dikatakan aman, pemerintah Tiongkok tetap waspada agar gerakan nasionalis tidak kembali melakukan aksinya dan memantau kegiatan para mantan pelaku agar tidak kembali bergabung di gerakan nasionalis tersebut.

Hingga saat ini, anggota kelompok separatisme “Turkistan Timur” masih ada di sekitar masyarakat. Dapat dilihat dalam kejadian beberapa organisasi dan media luar negeri memposting mengenai orang “Uighur yang hilang”. Contoh dari beritanya adalah tagar “#StillNoInfo” yang digunakan dalam platform media sosial Facebook dan Twitter. Dari tagar tersebut, banyak orang Uighur yang tinggal diluar negeri memposting foto dan nama kemudian mengklaim kerabat atau teman mereka tidak dapat dihubungi. Setelah dicari tahu kebenarannya oleh pihak berwenang dan

wartawan Global Times bahwa orang yang masuk dalam daftar “orang hilang” tersebut sebenarnya telah menjalani kehidupan normal seperti sudah mulai bekerja dan berkumpul kembali dengan keluarga. Selain itu mereka juga menemukan bahwa tokoh yang terlibat dalam memulai kegiatan untuk menemukan “orang Uighur yang hilang” di media sosial luar negeri adalah anggota kelompok dari separatis “Turkistan Timur”, selain itu upaya yang mereka lakukan merupakan upaya baru untuk merusak citra kebijakan Tiongkok (Jie & Juecheng, 2019). Salah satu orang yang dulunya dipengaruhi oleh ekstrimisme dan telah keluar dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja yaitu Ruzi Mumet. Ruzi Mumet telah kembali bekerja di pabrik sepatu wilayah Hotan dan pemerintah memberikan bantuan kepada Ruzi Mumet sebuah rumah seluas 80 meter persegi (Jie & Juecheng, 2019). Kehidupan keluarga Ruzi Mumet telah mengalami perbaikan ekonomi dan Ruzi Mumet ini merupakan salah satu orang yang masuk dalam daftar “orang hilang”.

Kedua, di Xinjiang terjadi perubahan tidak hanya mengenai pengembalian jaminan sosial dan pembangunan ekonomi saja, tetapi juga tentang perubahan cara pemikiran dan pemahaman masyarakat. Saat ini masyarakat Xinjiang mulai menyadari bahwa perkembangan Xinjiang tidak dapat dipisahkan dari kesatuan etnis, dan kepemimpinan CPC adalah jaminan mendasar bagi kemakmuran dan pembangunan Xinjiang (Weijian, 2020). Ketiga, masyarakat dari seluruh kelompok etnis mengambil beberapa langkah untuk menangani masalah terorisme, separatisme, dan ekstrimisme dengan cara yang komprehensif (Weijian, 2020). Semua usaha tersebut berjalan dengan tertib, akibatnya masyarakat di Xinjiang dapat hidup dan bekerja dalam kedamaian. Xinjiang telah bertahan dalam situasi pandemi covid-19. Sekitar bulan Maret 2020, dimana masa pandemik covid-19 pemerintah Xinjiang telah berupaya tegas dalam menerapkan keputusan dan pengaturan yang dibuat oleh Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok tentang pencegahan dan pengendalian virus dimana keselamatan dan kesehatan masyarakat Xinjiang dari semua kelompok etnis menjadi prioritas utama sehingga dari 73 pasien yang terinfeksi virus Covid-19 telah sembuh dan dapat dipulangkan dari rumah sakit dan tidak ada lagi kasus terbaru yang

telah dilaporkan selama 20 hari berturut-turut (Xin & Lingzhi, Global Times, 2020). Provinsi Xinjiang merupakan salah satu provinsi dan wilayah pertama di Tiongkok yang keluar dari pandemi ini (Weijian, 2020).

2.4 Penyebab Konflik suku Uighur dengan Tiongkok

2.4.1 Struktural

Faktor struktural yang akan dibahas disini adalah mengenai masalah keamanan dalam negeri Tiongkok. Hal tersebut dapat dilihat ketika Kerajaan Uighur Kaghan hancur, masyarakatnya harus mencari tempat baru untuk tinggal. Sebelum menemukan tempat yang baik menurut mereka, mereka sering berpindah-pindah tempat atau bisa disebut dengan nomaden sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk menetap di wilayah Xinjiang yang pada saat itu belum bernama Provinsi Xinjiang. Sejak saat itu hingga sekarang, masyarakat suku Uighur memutuskan untuk menetap di wilayah tersebut.

Wilayah Xinjiang berbatasan dengan 8 negara di antara lain India, Afghanistan, Mongolia, Russia, Kazakhstan, Krygyzstan, Tajikistan, dan Pakistan. Oleh sebab letak Xinjiang yang berbatasan dengan banyak negara membuat wilayah ini penting bagi Tiongkok. Dikarenakan letak Provinsi Xinjiang sangat strategis membuat wilayah itu tepat sebagai jalur perdagangan. Selain letaknya yang strategis, Provinsi Xinjiang juga penghasil minyak dan batu bara. Oleh karena letak yang strategis menyebabkan wilayah ini menjadi wilayah yang harus dijaga oleh Tiongkok agar kepentingan nasionalnya tetap terjaga di wilayah tersebut.

Dikarenakan masih adanya kelompok yang menginginkan berdirinya Republik Turkistan Timur, maka Tiongkok harus terus berusaha untuk menjaga keutuhan dan keamanan Provinsi Xinjiang. Apabila hal tersebut tidak dijaga dengan baik oleh Tiongkok maka akan menimbulkan munculnya gerakan-gerakan nasionalis dari negara yang masih berkonflik dengan Tiongkok seperti Tibet, Mongolia dan

Taiwan. Jika gerakan nasionalis dari negara-negara tersebut menguat maka akan mengancam keamanan dalam negeri Tiongkok.

2.4.2 Politik

Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki peradaban tertua di dunia sehingga membuat Tiongkok memiliki catatan sejarah yang panjang dan dinamika politik yang beragam. Kepentingan utama dari Tiongkok adalah kedaulatan. Dengan begitu bahwa Tiongkok tidak akan pernah membiarkan satu wilayahnya untuk lepas dari Tiongkok, hal ini juga berlaku bagi Provinsi Xinjiang. Memanasnya hubungan antara Suku Uighur dengan Pemerintah Tiongkok juga disebabkan dengan adanya gerakan-gerakan nasionalis yang menginginkan kemerdekaan Republik Turksitan Timur di Xinjiang. Gerakan ini sudah ada di wilayah Xinjiang sejak dari dulu. Gerakan ini bermaksud untuk tidak sejalan dengan kepemimpinan Tiongkok seperti di Tahun 1930 dan 1940, dimana Suku Uighur berhasil untuk memerdekakan diri dan mendirikan Republik Turkistan Timur. Kemerdekaan Republik Turkistan Timur tidak berlangsung lama, sebab Pemerintahan Tiongkok pada tahun 1949, mengambil alih kekuasaan dan menyatakan bahwa Xinjiang sebagai salah satu kawasan otonomi Tiongkok yang terletak paling ujung Tiongkok dan Provinsi yang berbatasan dengan negara lain. Dan yang semakin membuat hubungan diantara Tiongkok dan Uighur memanas adalah adanya kelompok separatis dan terorisme. Dimana kelompok ini mulai menunjukkan eksistensi kegiatan mereka sehingga membuat Tiongkok tidak bisa membiarkan kelompok ini semakin meluas dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang lebih besar.

2.4.3 Ekonomi

Semenjak Pemerintahan Tiongkok memutuskan untuk melakukan migrasi besar-besaran terhadap suku Han ke Provinsi Xinjiang membuat suku Uighur merasakan persaingan yang ketat di Provinsi Xinjiang. Setelah kedatangan suku Han tahun 1949 di Provinsi Xinjiang, suku Uighur tidak dapat mendominasi wilayah tersebut seperti dulu. Hal itu disebabkan karena masyarakat suku Han lebih fasih

berbahasa Tiongkok dan memiliki kemampuan yang lebih memadai dan terlatih sehingga menyebabkan suku Uighur banyak kehilangan pekerjaan dan jatuh dalam kemiskinan (Authenticated U.S. Government Information, 2007). Karena Suku Uighur kalah bersaing di dalam penerimaan lapangan pekerjaan menimbulkan kesenjangan ekonomi antara Suku Uighur dan Suku Han. Dari kesenjangan sosial ini memicu pertentangan antara kedua suku.

Perkembangan ekonomi yang semakin meningkat dan orang-orang Suku Uighur yang tidak mampu bersaing dengan Suku Han terdorong untuk meninggalkan Xinjiang dengan harapan mampu mendapatkan pekerja dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun usaha Uighur ini makin membuat mereka terpinggirkan karena pada umumnya yang pindah ke negara lain adalah kaum wanita. Para wanita ini kebanyakan hanya menjadi budak dan tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik (Karisma, 2017). Pemerintah Tiongkok melakukan pembangunan ekonomi secara terus-menerus. Karena pembangunan ekonomi yang dilakukan secara terus-menerus membuat warga Tiongkok diluar wilayah Xinjiang datang untuk mencari penghidupan yang layak. Dikarenakan Suku Han lebih fasih berbahasa Tiongkok membuat pemuda dari Suku Han lebih banyak diterima di lapangan pekerjaan dibandingkan dengan Suku Uighur (Karisma, 2017). Alasan lain yang membuat Tiongkok terus berusaha untuk tetap menguasai wilayah Xinjiang dikarenakan Xinjiang merupakan ladang minyak yang sangat penting bagi Tiongkok apalagi sekarang Tiongkok menjadi salah satu negara maju di dunia. Selain sebagai ladang minyak, juga menghasilkan gas alam.

Xinjiang juga termasuk dalam Jalur Sutera (*Silk Road*) dikarenakan posisi wilayah provinsi ini berdampingan dengan banyak negara dan sudah sejak dahulu kala wilayah ini sebagai jalur perdagangan serta posisi Xinjiang memiliki arti penting dalam kerjasama dengan berbagai wilayah baik Asia Tengah, Asia Barat, Asia Tenggara dan Timur dan Eropa Barat (Li, Ni, & Zhao, 2008). Karena posisi

pentingnya, membuat Tiongkok berusaha melakukan berbagai upaya agar dapat mempertahankan dan menegakkan kedaulatannya di provinsi tersebut apalagi hubungan antara Tiongkok dengan suku Uighur masih belum stabil.

2.4.4 Budaya

Secara historis, masyarakat Uighur merasa bahwa mereka memiliki perbedaan identitas dengan Tiongkok. Uighur banyak dipengaruhi oleh budaya dari Asia Tengah seperti Kazakhstan, Tajikistan, Kirghiztan, Pakistan, Turki. Mereka juga berkeyakinan bahwa suku Uighur di Provinsi Xinjiang adalah keturunan Turki sehingga membuat mereka selalu berusaha untuk memerdekakan diri dan memisahkan diri dari Pemerintahan Tiongkok seperti yang sudah mereka lakukan di Tahun 1933 dan 1944, dimana mereka mendirikan Republik Turkistan Timur, namun wilayah yang digunakan untuk mendirikan Republik Turkistan Timur telah dikuasai oleh Tiongkok dan menjadi wilayah otonomi Tiongkok sejak tahun 1955 dan mengganti nama wilayahnya menjadi Xinjiang. Diantara suku Han dan suku Uighur memiliki perbedaan budaya yang menyebabkan suku Uighur sulit untuk beradaptasi dengan suku Han. Akibat dari perbedaan budaya yang dirasakan oleh suku Uighur menimbulkan kekhawatiran dalam diri suku Uighur akan hilangnya identitas budaya mereka. Karena kekhawatiran mereka itulah semakin mengeraskan sikap Uighur untuk menolak sejalan dengan Tiongkok. Hingga sekarang diantara Pemerintahan Tiongkok dan suku Uighur masih sulit untuk hidup berdampingan secara damai sehingga masih sering terjadi gesekan-gesekan.

2.5 Tekanan Internasional terhadap pemerintah Tiongkok

Dalam upaya Tiongkok untuk mengatasi gerakan nasional yang terdiri dari terorisme, separatisme dan ekstrimisme agama membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja. Pusat Pendidikan dan Pelatihan kerja ini akan memberikan berbagai tambahan pendidikan dibidang sains dan teknologi dan pelatihan ketrampilan agar orang-orang yang terindikasi pada gerakan itu jika sudah keluar dari pusat pendidikan dan pelatihan kerja dapat bersosialisasi dengan masyarakat lebih baik dan mampu

mendapat pekerjaan untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Namun upaya Tiongkok ini mendapat respon dari Internasional yang berupa tekanan. Tekanan yang diberikan sebagai berikut :

2.5.1 Surat Protes

Pada Juli, 22 negara di PBB melakukan langkah yang tidak biasa yaitu mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyerukan agar Tiongkok mengakhiri penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran lainnya terhadap hak-hak muslim di wilayah Xinjiang (Garside & Harrison, 2019). Dalam merespon pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja, 22 negara yang terdiri dari delegasi negara Eropa di PBB yang bergabung dengan Kanada, Jepang, Selandia Baru, dan Australia tidak hanya mengecam penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap suku Uighur melainkan juga menandatangani sebuah surat protes (Saputra Y. E., Tempo, 2019). Surat protes ini diberikan karena menurut mereka Tiongkok telah melakukan penahanan 1 juta orang yang kebanyakan adalah suku Uighur di kamp-kamp pengasingan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja) dan untuk memberikan akses kepada para pengamat internasional untuk mengunjungi kamp-kamp penahanan (The Economist, 2019). Surat itu berisi di antara lain pertama, puluhan Dubes dari berbagai negara - negara tersebut menyerukan agar otoritas Tiongkok untuk mengentikan penahanan secara sewenang-wenang terhadap warga Uighur (Saputra Y. E., Tempo, 2019). Kedua, puluhan Dubes ini mendorong Tiongkok agar memberikan kebebasan pergerakan bagi warga suku Uighur dan warga muslim lainnya dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang (Voa Indonesia, 2019). Dengan ditanda tangani surat protes ini, menjadi sebuah pertanda tantangan internasional secara besar-besaran dan bersama yang pertama kali terhadap kebijakan berkelanjutan Tiongkok di wilayah Provinsi Xinjiang, dimana para ahli memperkirakan ada sekitar jutaan orang telah ditahan di kamp-kamp penahanan besar bergaya pendidikan ulang tersebut. Inggris, Perancis, dan Jerman yang termasuk dalam 18 negara Eropa yang menandatangani surat yang berisi keprihatinan tentang *“credible reports of arbitrary detention ... as well as widespread surveillance and*

restrictions, particularly targeting Uyghurs and other minorities in Xinjiang." serta dari Australia, Selandia Baru, Kanada, Jepang yang ikut menandatangani surat tersebut mengatakan *"The joint statement is important not only for Xinjiang's population, but for people around the world who depend on the UN's leading rights body to hold even the most powerful countries to account,"* pernyataan ini dikatakan oleh John Fisher, Direktur Human Right Watch di Jenewa(Westcott & Shelley, 2019).

2.5.2 Amerika blacklist beberapa perusahaan dari Tiongkok

Departemen Perdagangan Amerika Serikat telah memasukkan 28 entitas dari Tiongkok ke dalam daftar hitam (blacklist). Amerika mengambil langkah ini karena mereka menganggap bahwa 28 perusahaan ini telah melakukan tindak penindasan terhadap suku Uighur dan telah melanggar Hak Asasi Manusia. Setelah masuk daftar hitam tersebut, 28 perusahaan ini Tiongkok dilarang untuk menjual produknya ke Amerika ataupun melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat termasuk membeli produk (Kompas.com, 2019). Dari 28 perusahaan yang masuk dalam daftar hitam (blacklist) adalah 18 biro keamanan publik dan delapan perusahaan.

Amerika menambahkan daftar perusahaan yang masuk dalam daftar hitam yaitu sebanyak 33 perusahaan (Pramadiba, 2020). Alasan Amerika menambahkan adalah karena Amerika menganggap bahwa mereka terlibat dalam operasi mata-mata Uighur atau pengembangan senjata pemusnah massal untuk militer Tiongkok dan mereka menganggap juga bahwa Tiongkok telah bertindak represif, tidak adil, dan menerapkan pengawasan teknologi canggih terhadap komunitas Uighur. Perusahaan yang masuk dalam daftar hitam adalah NetPosa, CloudMinds, Qihoo360 (Pramadiba, 2020).

Amerika kembali menambahkan jumlah perusahaan yang dblacklist. Alasan mereka memasukkan sebelas perusahaan tersebut karena mereka berkeyakinan bahwa 11 perusahaan tersebut telah terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap suku Uighur di Provinsi Xinjiang khususnya dalam penerapan kerja paksa dan suku minoritas lain. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan dapat membeli barang dari perusahaan asal Amerika tanpa persetujuan pemerintah Amerika Serikat. Beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar hitam di antara lain KTK Group Co, Tanyuan Technology Co, Esquel Textile Co, Hetian Haolin Hair Accessories Co, dan lain-lain (Kompas.com, 2020). Departemen Perdagangan AS kembali memberikan sanksi kepada lembaga pemerintahan Tiongkok dan 8 perusahaan dikarenakan pelanggaran HAM, kekerasan kampanye, penahanan massal yang sewenang-wenang, kerja paksa dan pengawasan teknologi tinggi terhadap Uighur (Wirawan, 2020).

2.5.3 Kritik dari PBB

Anggota PBB meminta untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial. Dasar dari permintaan anggota PBB ini didapat dalam sebuah laporan yang menunjukkan bahwa Tiongkok telah mengubah otonomi wilayah Uighur menjadi sesuatu yang menyerupai kamp interniran besar-besaran. Dapat disimpulkan kritik dari PBB berupa definisi luas terorisme dan referensi samar-samar keekstrimisme dan definisi separatisme yang tidak jelas dalam undang-undang China (BBC, 2018). PBB meminta beberapa hal kepada Tiongkok di antara lain mengakhiri praktik penahanan tanpa dakwaan, pengadilan dan hukuman yang sah; segera membebaskan orang-orang yang saat ini ditahan dalam keadaan seperti ini; memberikan jumlah orang yang ditahan serta alasan penahanan mereka; melakukan “investigasi yang tidak memihak terhadap semua tuduhan profil ras, etnis, dan etnis-agama” (BBC, 2018). PBB juga menekan pemerintah Tiongkok untuk segera mengentikan kamp-kamp (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja) di Xinjiang. Enam ahli dan pejabat di bidang Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkritik peraturan yang dikutip oleh Tiongkok untuk membenarkan penahanan massal, dengan mengatakan bahwa aturan itu “*incompatible with China’s obligations under international human right law*” (Buckley & Ramzy,

2019). Michelle Bachelet selaku pejabat tinggi PBB menekan agar lembaga global ini diberikan akses masuk ke kamp-kamp untuk menyelidiki apakah benar tuduhan yang diberikan yaitu pelanggaran hak asasi manusia tersebut benar terjadi didalam kamp tersebut (Westcott & Shelley, 2019)..

2.5.4 Amerika membuat The Uyghur Act 2019

Pada Juni 2020, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menandatangani undang-undang yang telah disahkan dan mendapat dari dukungan Kongres, yang berpesan bahwa setia individu yang terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia dia Xinjiang akan diberikan sanksi karena telah menindas warga suku Uighur. Undang-undang ini juga mewajibkan kepada pelaku bisnis dan setiap individu Amerika Serikat yang menjual produk atau yang beroperasi di wilayah Xinjiang agar memastikan apakah aktivitas si pembeli produk berkontribusi atau terlibat pada pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kerja paksa (Maizlan, 2020). Dewan Perwakilan Rakyat Amerika mendukung pembuatan RUU yang dapat menjatuhkan sanksi pada pejabat Tiongkok (Buckley & Ramzy, 2019).

Maksud dari Donald Trump menandatangani undang-undang ini adalah untuk menghukum Tiongkok atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim Uighur. Tujuan dari UU ini adalah untuk mengatasi pelanggaran HAM skala besar-besaran, termasuk penahanan massal sebanyak 1 juta orang dari suku Uighur (BBC Indonesia, 2019). Dibawah undang-undang tersebut pemerintah Amerika memiliki waktu 180 hari untuk menyerahkan laporan kepada Kongres untuk mengidentifikasi siapa saja pejabat pemerintah Tiongkok dan individu lain yang bertanggung jawab dalam melakukan penyiksaan, penahanan berkepanjangan tanpa dakwaan dan pengadilan, penculikan, perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat kelompok minoritas muslim dan penolakan mencolok lainnya atas “hak untuk hidup, kebebasan, atau keamanan” orang di Xinjiang (Liptak, 2020). Orang-orang yang telah teridentifikasi nantinya akan diberikan sanksi diantara lain pemblokiran aset, pencabutan visa, dan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Amerika Serikat. Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, mengatakan bahwa dengan

disetujuinya RUU ini menandakan bahwa Kongres AS mengambil langkah serius untuk melawan pelanggaran HAM yang terjadi di Tiongkok terhadap suku Uighur. Undang-undang ini akan mendorong Kementerian Luar Negeri AS membuat laporan resmi terkait dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang selama satu tahun terakhir dan Kementerian Perdagangan AS harus melarang ekspor kepada seluruh perusahaan yang ada di Xinjiang, termasuk kepada orang yang diberikan sanksi tersebut (CNN Indonesia, 2019).

Dari kacamata pemerintah Amerika Serikat bahwa kebijakan pemerintah Tiongkok antara lain pengawasan dengan teknologi canggih yang menjangkau segala aspek, termasuk pengumpulan sample DNA anak-anak Uighur, penggunaan kode QR diluar lingkungan rumah untuk mengumpulkan informasi tentang berapa kali warga suku Uighur menunaikan shalat dan perangkat lunak pengenalan suara dan wajah dan database “*predictive policing*” untuk memperkirakan kapan serta dimana tindak kriminal yang kemungkinan akan terjadi (BBC Indonesia, 2019). Menurut AS, Tiongkok telah melakukan “diskriminasi sistematis” terhadap warga suku Uighur dengan cara “menafikan berbagai hak politik dan sipil, termasuk kebebasan berekspresi, beragama, bergerak, dan persidangan yang adil” (BBC Indonesia, 2019).

2.5.5 Sikap Uni Eropa terhadap kebijakan Tiongkok

Inggris mendesak Tiongkok agar memberikan akses kepada PBB untuk masuk kedalam pusat-pusat tersebut dengan memberikan akses secara langsung dan tidak terbatas yang telah menahan satu juta warga suku Uighur dan minoritas muslim lainnya yang ditahan tanpa ada pengadilan. Brussel sebagai salah satu perwakilan dari Uni Eropa, juga memberikan tanggapan atas pusat pendidikan dan pelatihan kerja ini, bahwa sangat tidak suka atas konsep “*political re-education camps*” dan mereka akan terus mengangkat masalah pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dengan para pejabat Tiongkok. Seorang juru bicara Uni Eropa mengatakan :

“We have consistently spoken out against the existence of political re-education camps, widespread surveillance and restrictions of freedom of

religion or belief against Uighurs and other minorities in Xinjiang” dan “We as the European Union continue to expect China to uphold its international obligations and to respect human rights, including when it comes to the rights of persons belonging to minorities, especially in Xinjiang but also in Tibet, and we will continue to affirm those positions in this context in particular.”(Garside & Harrison, 2019).

Uni Eropa akan selalu memberikan tekanan kepada Pemerintah Tiongkok sampai mereka menghentikan kegiatan dari kamp tersebut dan memberikan akses kepada dunia luar untuk masuk kedalam kamp tersebut dan melihat apakah benar terjadi pelanggaran HAM, jika Tiongkok terus tidak memberikan akses dan pembuktian maka Uni Eropa akan terus memberikan tekanan kepada Tiongkok.

